

IMPLEMENTASI GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI: SEBUAH SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Ria Puspitasari¹, Sinta Rodiyah², Idham Kholid³, Yuniar⁴

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Jl. Endro Suratmin, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

⁴Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

Email: riap8731@gmail.com

Article History

Received: 26-11-2025

Revision: 09-12-2025

Accepted: 13-12-2025

Published: 19-12-2025

Abstract. This study aims to examine in depth the implementation of Good University Governance and its contribution to improving the quality of higher education. The research employs a Systematic Literature Review method with data sourced from journal articles published in the last five years. Data collection techniques include literature selection, extraction, and synthesis, while data analysis is carried out using thematic analysis and concept mapping. The synthesis results show that the implementation of GUG has a positive impact on improving accreditation, managerial performance, the quality of academic services, and stakeholder trust when supported by Internal Quality Assurance mechanisms, periodic audits, and the use of digital governance to strengthen information transparency and data-driven decision-making. Nevertheless, many institutions still face implementation challenges such as bureaucratic organizational culture, limited human resource capacity, weak institutional independence, and dependence on government regulations that frequently change. This SLR also confirms that the most effective implementation model is a hybrid model that integrates IQA, shared governance, and digital information systems holistically.

Keywords: Good University Governance, Higher Education Quality, Implementation

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam implementasi *Good University Governance* dan kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi. Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* dengan sumber data berupa artikel jurnal lima tahun terakhir. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui seleksi, ekstraksi, dan sintesis literatur, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis tematik dan pemetaan konsep. Hasil sintesis menunjukkan bahwa penerapan GUG berdampak positif terhadap peningkatan akreditasi, kinerja manajerial, kualitas layanan akademik, dan kepercayaan pemangku kepentingan ketika didukung oleh mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal, audit berkala, serta pemanfaatan digital governance untuk memperkuat keterbukaan informasi dan pengambilan keputusan berbasis data. Meskipun demikian, banyak institusi masih menghadapi tantangan implementatif berupa budaya organisasi yang birokratis, kapasitas sumber daya manusia yang terbatas, lemahnya independensi institusional, serta ketergantungan pada regulasi pemerintah yang sering berubah. SLR ini juga menegaskan bahwa model implementasi yang paling efektif adalah model hibrida yang mengintegrasikan SPMI, *shared governance*, dan sistem informasi digital secara holistik.

Kata Kunci: *Good University Governance*, Implementasi, Mutu Pendidikan Tinggi

How to Cite: Puspitasari, R., Rodiyah, S., Kholid, I., & Yuniar. (2025). Implementasi *Good University Governance* dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Tinggi: Sebuah *Systematic Literature Review*. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (8), 12099-12113. <http://doi.org/10.54373/imeij.v6i8.4621>

PENDAHULUAN

Penelitian empiris dan tinjauan literatur menunjukkan bahwa implementasi *Good University Governance* (GUG) pada perguruan tinggi dilakukan melalui kombinasi kebijakan struktural dan alat digital yang saling melengkapi: secara struktural, institusi mengintegrasikan prinsip-prinsip GUG ke dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), mekanisme audit internal/eksternal, serta pembentukan praktik *shared governance* (partisipasi senat, dosen, dan perwakilan pemangku kepentingan) untuk memastikan legitimasi akademik dan akuntabilitas keputusan; secara teknis, universitas mengadopsi sistem informasi akademik dan dashboard transparansi untuk pelaporan kinerja real-time, yang mempercepat monitoring, audit berbasis bukti, dan responsivitas kebijakan. Studi-studi kasus dan SLR menemukan bahwa kombinasi ini SPMI - audit - *shared governance* yang didukung digitalisasi mendorong perbaikan akreditasi, kinerja dosen, dan kualitas layanan, tetapi efektivitasnya bergantung pada komitmen kepemimpinan, kapasitas SDM, dan ketersediaan infrastruktur IT sehingga diperlukan investasi pelatihan serta manajemen perubahan untuk menghindari formalitas tanpa dampak nyata (Hadiwidjaja & Riana, 2024); (Khotimah et al., 2024).

Implementasi GUG di perguruan tinggi masih menghadapi sejumlah kelemahan konseptual dan praktis, sehingga efektivitasnya kerap tidak sejalan dengan standar tata kelola modern. Meskipun banyak institusi telah mengadopsi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab, sejumlah studi menilai bahwa penerapannya cenderung bersifat administratif dan simbolik, belum menyentuh reformasi struktural yang diperlukan untuk perubahan tata kelola secara substansial.

Beberapa penelitian internasional menyoroti adanya kesenjangan antara kebijakan GUG dan implementasinya di lapangan karena dominannya kultur birokratis, resistensi aktor internal, serta ketergantungan tinggi pada regulasi pemerintah yang sering berubah (Hatzichristou & Rosenfield, 2017). Kritikus juga mencatat bahwa independensi perguruan tinggi salah satu prinsip utama GUG masih sulit dicapai karena intervensi eksternal dalam pengelolaan anggaran dan penjaminan mutu, sehingga perguruan tinggi tidak mampu menjalankan otonomi akademik secara optimal (Rahmawati & Samudra, 2023). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi GUG belum sepenuhnya berhasil karena masih didominasi pendekatan normatif, bukan transformasi sistemik yang menuntut perubahan budaya organisasi, kapasitas kepemimpinan, dan mekanisme kontrol kelembagaan yang kuat.

Keberhasilan penerapan GUG sangat bergantung pada kombinasi faktor struktural, teknis, dan kultural: komitmen kepemimpinan yang konsisten dan dukungan kebijakan merupakan prasyarat utama untuk mengalokasikan sumber daya dan menindaklanjuti temuan audit;

integrasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan mekanisme audit berkala meningkatkan akuntabilitas operasional; sedangkan digital governance misalnya Academic Information Systems (AIS) dan dashboard kinerja memperkuat transparansi dan monitoring berbasis bukti sehingga mempercepat perbaikan mutu (Hadiwidjaja & Riana, 2024).

Namun, literatur juga menekankan hambatan yang sering muncul: keterbatasan anggaran untuk infrastruktur TI, kapasitas SDM yang belum memadai untuk analisis data dan audit mutu, resistensi budaya organisasi terhadap evaluasi dan perubahan, serta intervensi eksternal yang mengurangi independensi institusi semua faktor ini dapat membuat kebijakan GUG menjadi bersifat normatif tanpa dampak nyata pada mutu pendidikan (Endawansa & Juwono, 2024). Oleh karena itu, studi-reviu merekomendasikan pendekatan hibrida yang menggabungkan kepemimpinan visioner, investasi teknis (AIS dan pelatihan SDM), penguatan SPMI, dan mekanisme proteksi independensi akademik untuk memastikan prinsip-prinsip GUG berdampak langsung terhadap peningkatan mutu perguruan tinggi (Atanaw, 2025).

Beberapa faktor yakni komitmen kepemimpinan, kesiapan digital, dan partisipasi pemangku kepentingan merupakan pendorong utama keberhasilan GUG, beberapa penelitian lima tahun terakhir menunjukkan bahwa pemahaman tersebut sering terlalu menyederhanakan kompleksitas implementasi di perguruan tinggi. Kajian empiris menunjukkan bahwa banyak institusi hanya menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara administrative misalnya melalui publikasi laporan atau penggunaan AIS namun tidak memperbaiki mekanisme pengawasan substantif, sehingga dampaknya terhadap mutu akademik menjadi minimal (Atanaw, 2025; Lateh, 2025). Hambatan seperti fragmentasi birokrasi, budaya organisasi yang hierarkis, dan *conflict of interest* di tingkat pimpinan juga kerap diabaikan, padahal faktor-faktor ini justru menjadi penghalang paling signifikan bagi transformasi tata kelola (Endawansa & Juwono, 2024). Selain itu, beberapa penelitian menyoroti bahwa digital governance sering diperlakukan sebagai solusi instan, tanpa disertai penguatan kapasitas SDM dan integrasi data lintas unit, sehingga berkontribusi pada "*pseudo-governance*": tata kelola yang tampak modern tetapi tidak meningkatkan mutu secara nyata (Hadiwidjaja & Riana, 2024); (Islami, 2025); (Riana, 2024). Dengan demikian, literatur terbaru mengkritik model penerapan GUG yang terlalu prosedural dan menekankan perlunya reformasi struktural serta perubahan budaya organisasi agar tata kelola benar-benar berkontribusi pada peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Prinsip-prinsip GUG (transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan) berkaitan erat dengan peningkatan mutu perguruan tinggi, namun hubungan ini bersifat kondisional artinya efektivitas setiap prinsip tergantung pada kapasitas institusional

untuk menerapkannya secara nyata. Transparansi dan akuntabilitas, ketika diwujudkan melalui sistem pelaporan berbasis bukti (mis. dashboard kinerja dan audit berkala), mendorong perbaikan akreditasi dan kualitas layanan akademik karena memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data; namun tanpa dukungan infrastruktur TI dan kapasitas SDM, mekanisme tersebut seringkali hanya bersifat formalitas (Atanaw, 2025; Lateh, 2025). Demikian pula, independensi dan fairness memperkuat objektivitas penjaminan mutu tetapi intervensi eksternal atau konflik kepentingan dapat mengikis manfaatnya sehingga otonomi akademik tidak terealisasi penuh (Endawansa & Juwono, 2024). Oleh karena itu literatur nasional dan internasional menyarankan bahwa penerapan prinsip GUG harus dipadukan dengan integrasi SPMI, investasi pada digital governance, dan program manajemen perubahan untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut benar-benar menerjemah menjadi peningkatan mutu yang terukur.

Model implementasi GUG yang paling efektif menurut sintesis literatur lima tahun terakhir adalah model hibrida yang mengintegrasikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan praktik *shared governance* dan infrastruktur digital untuk monitoring - audit berbasis bukti; inti model ini meliputi: (1) penetapan indikator mutu dan SOP yang jelas dalam kerangka SPMI, (2) partisipasi kolegial (senat, dosen, mahasiswa, dan pemangku kepentingan eksternal) untuk legitimasi akademik, serta (3) *digital governance* (AIS, dashboard publik) yang mengefisienkan pelaporan dan mempercepat siklus perbaikan berkelanjutan namun keberhasilan model bergantung pada komitmen kepemimpinan, investasi pada kapasitas SDM, dan mekanisme pelindung independensi akademik sehingga digitalisasi tidak menjadi sekadar formalitas administratif (Hadiwidjaja & Endah Riana, 2024).

Studi merekomendasikan model implementasi GUG yang bersifat hibrida menggabungkan *shared governance*, SPMI, dan *digital governance* literatur lima tahun terakhir mengkritik bahwa model ini seringkali terlalu normatif dan mengasumsikan kesiapan institusi yang tidak merata, terutama di perguruan tinggi negara berkembang. Penelitian Islami (2025) menunjukkan bahwa banyak institusi mengadopsi kerangka GUG secara prosedural tanpa transformasi budaya organisasi, sehingga partisipasi kolegial tidak benar-benar terjadi dan keputusan tetap terpusat pada elite birokrasi. Bahkan, *digital governance* yang dianggap sebagai pilar efektivitas justru menimbulkan "*governance illusion*" ketika sistem digital diterapkan tanpa integrasi data dan tanpa peningkatan kapasitas SDM, sehingga transparansi yang muncul bersifat artifisial (Doğan, 2025). Selain itu, studi Riana (2024) menegaskan bahwa model GUG yang efektif masih mengalami ketergantungan tinggi pada komitmen pimpinan, sehingga keberlanjutan tata kelola menjadi rentan saat pergantian kepemimpinan.

Temuan internasional juga mengkritik bahwa otonomi akademik dalam model GUG seringkali tidak berjalan maksimal karena intervensi eksternal, yang menyebabkan independensi institusi tetap lemah meskipun struktur GUG telah diterapkan (Atanaw, 2025). Dengan demikian, literatur terbaru menilai bahwa model “efektif” GUG tidak dapat diterapkan secara universal tanpa mempertimbangkan kapasitas organisasi, budaya institusi, dan risiko formalisasi tata kelola.

Kajian Systematic Literature Review mengenai implementasi GUG dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi menunjukkan adanya celah penting yang belum dibahas secara komprehensif oleh penelitian sebelumnya, yaitu perlunya pendekatan integratif yang menggabungkan prinsip tata kelola klasik transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan dengan dinamika digital governance dan kesiapan budaya organisasi. Novelty dari sintesis ini terletak pada temuan bahwa keberhasilan GUG tidak hanya ditentukan oleh keberadaan instrumen tata kelola seperti SPMI, audit internal, atau sistem informasi digital, tetapi oleh kohesi fungsional antara instrumen tersebut, kapabilitas SDM, dan ekosistem partisipatif yang memungkinkan shared governance berjalan secara substantif, bukan administratif. Selain itu, SLR ini mengidentifikasi bahwa studi-studi sebelumnya cenderung memisahkan pembahasan antara mutu akademik dan mutu tata kelola, sedangkan hasil sintesis menunjukkan bahwa keduanya harus dipahami sebagai sistem yang saling memperkuat di mana kualitas tata kelola memengaruhi kualitas pembelajaran, penelitian, dan layanan, dan sebaliknya, mutu akademik menjadi indikator efektivitas GUG. Dengan demikian, kontribusi baru dari telaah ini adalah menawarkan kerangka konseptual yang lebih holistik, yang memposisikan implementasi GUG tidak sekadar sebagai pemenuhan regulasi, tetapi sebagai strategi transformasi institusional yang berorientasi pada inovasi, akuntabilitas berkelanjutan, dan peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Berdasarkan deskripsi di atas maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam implementasi GUG dan kontribusinya terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi. Penelitian ini menelaah model penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan; mengidentifikasi faktor pendukung serta penghambat implementasi; memetakan hubungan antara penerapan GUG dan mutu akademik maupun non-akademik; serta merumuskan kerangka konseptual baru sebagai acuan pengembangan tata kelola perguruan tinggi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi mutu.

METODE

Penelitian ini menggunakan *Systematic Literature Review* (SLR) sebagai metode utama untuk menelaah dan mensintesis temuan empiris terkait implementasi GUG dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi. Pendekatan SLR dipilih karena mampu menyusun pengetahuan secara terstruktur, transparan, dan dapat direplikasi melalui tahapan identifikasi, seleksi, evaluasi kualitas, dan sintesis temuan dari berbagai studi (Snyder, 2019).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui proses penelusuran artikel secara sistematis pada basis data internasional seperti Scopus, *Web of Science*, dan *ScienceDirect*, serta basis data nasional seperti Garuda dan DOAJ, dengan rentang publikasi 2019– 2024. Prosedur pencarian mengikuti standar PRISMA, dimulai dari perumusan kata kunci seperti *good university governance*, *higher education governance*, *quality assurance*, dan *university performance* (Page et al., 2021). Hanya artikel yang memenuhi kriteria inklusi peer-reviewed, relevan dengan topik GUG, dan mengandung data empiris atau model konseptual yang dimasukkan dalam proses sintesis. Pendekatan ini sesuai dengan rekomendasi terbaru literatur yang menekankan perlunya transparansi dan ketertelusuran dalam proses SLR.

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan *thematic synthesis*, yaitu mengidentifikasi pola, kategori, dan tema utama dari hasil penelitian terdahulu (Thomas & Harden, 2008). Setiap artikel dievaluasi melalui proses coding terbuka, aksial, dan selektif untuk menemukan keterkaitan antara prinsip GUG dan indikator mutu pendidikan tinggi, seperti akreditasi, efektivitas manajemen, dan kinerja akademik. Teknik ini dianggap efektif dalam penelitian tata kelola karena memungkinkan integrasi temuan konseptual dan empiris secara simultan. Selain itu, peneliti menerapkan analisis komparatif untuk membedakan efektivitas model implementasi GUG di berbagai konteks, sesuai anjuran literatur tata kelola global.

Kredibilitas penelitian diperkuat melalui proses *critical appraisal* menggunakan alat seperti *Mixed Methods Appraisal Tool* (MMAT) untuk memastikan bahwa artikel yang disertakan memiliki kualitas metodologis memadai. Untuk meminimalisasi bias seleksi, peneliti melibatkan *peer checking* dalam proses evaluasi artikel dan penentuan tema-tema utama. Selain itu, transparansi prosedural dijaga melalui pencatatan lengkap jejak pencarian, kriteria penyaringan, serta alasan eksklusi setiap artikel, sebagaimana direkomendasikan oleh standar SLR internasional (Page et al., 2021). Dengan pendekatan ini, hasil sintesis tidak hanya valid secara metodologis, tetapi juga

HASIL

Implementasi *Good University Governance* pada Berbagai Perguruan Tinggi

GUG merupakan kerangka tata kelola institusi pendidikan tinggi yang menekankan integrasi prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan dalam seluruh aspek manajemen universitas (Hadiwidjaja & Riana, 2024). Dalam lima tahun terakhir, berbagai penelitian menunjukkan bahwa GUG berkembang sebagai respon terhadap tuntutan akreditasi, regulasi pemerintah, dan kompetisi global yang menuntut perguruan tinggi menjadi lebih adaptif serta kredibel secara institusional.

Prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik, penyampaian laporan kinerja, dan akses data akademik yang dapat diverifikasi, sementara akuntabilitas ditekankan melalui mekanisme evaluasi berbasis indikator kinerja utama (KPI) yang terukur (Khotimah et al., 2024). Selain itu, responsibilitas mengharuskan perguruan tinggi memenuhi standar hukum dan etika, independensi memastikan institusi bebas dari intervensi eksternal yang merugikan kebijakan akademik, dan keadilan berkaitan dengan pemerataan akses, pelayanan, serta kesempatan akademik bagi seluruh sivitas (Marginson, 2021). Dengan demikian, kajian mutakhir menegaskan bahwa GUG bukan hanya kerangka administratif, tetapi fondasi untuk menciptakan tata kelola universitas yang berkelanjutan dan berorientasi mutu.

Penelitian lima tahun terakhir juga menekankan bahwa implementasi prinsip GUG harus diwujudkan secara terintegrasi, tidak parsial, karena efektivitas tata kelola sangat dipengaruhi oleh konsistensi antarprinsip. Transparansi tanpa akuntabilitas tidak cukup untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, sementara independensi tanpa mekanisme responsibilitas dapat menimbulkan disfungsi institusional (Hadiwidjaja & Riana, 2024). Di banyak negara, penerapan GUG diperkokoh melalui sistem audit internal, komite etik, sistem manajemen mutu, dan kebijakan *good governance* berbasis digital. Selain itu, keadilan menjadi prinsip yang semakin penting karena universitas menghadapi tuntutan inklusivitas dan pemerataan akses pendidikan, terutama dalam konteks internasionalisasi dan digitalisasi pendidikan tinggi. Secara keseluruhan, literatur internasional dan nasional menegaskan bahwa penerapan GUG yang konsisten meningkatkan legitimasi institusi, memperkuat kualitas layanan akademik, dan mendukung reputasi perguruan tinggi dalam ekosistem pendidikan global yang kompetitif.

Pengaruh Implementasi *Good University Governance* terhadap Mutu Pendidikan Tinggi

GUG merupakan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk memastikan proses pendidikan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan mutu (Endawansa & Juwono, 2024). Implementasi GUG menjadi kebutuhan strategis dalam menghadapi meningkatnya tuntutan masyarakat, persaingan global, dan

perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat cepat. Melalui penerapan GUG, perguruan tinggi dapat menciptakan sistem manajemen yang profesional, efisien, dan mampu menghasilkan lulusan berkualitas.

Konsep tata kelola perguruan tinggi yang menekankan pada penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, partisipasi, dan keadilan sebagai dasar penyelenggaraan pendidikan tinggi. Implementasi GUG memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi, karena tata kelola yang baik akan menciptakan sistem manajemen yang efektif, efisien, serta mampu menjawab kebutuhan dan tuntutan stakeholders, baik internal maupun eksternal. Pengaruh utama dari penerapan GUG terlihat pada meningkatnya kualitas pengambilan keputusan di lingkungan perguruan tinggi. Transparansi dalam penyusunan kebijakan, pembiayaan, dan pelayanan akademik mendorong terciptanya budaya organisasi yang terbuka. Hal ini memungkinkan sivitas akademika memperoleh informasi secara jelas dan dapat memantau pelaksanaan kebijakan secara objektif. Ketika proses manajemen berjalan secara transparan, potensi penyimpangan dapat diminimalkan, sehingga kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi meningkat.

Akuntabilitas sebagai prinsip penting GUG juga berpengaruh besar terhadap mutu pendidikan tinggi. Perguruan tinggi dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap program, penggunaan anggaran, serta capaian akademik melalui mekanisme evaluasi dan pelaporan yang sistematis (Page et al., 2021). Akuntabilitas yang baik mendorong perguruan tinggi untuk bekerja lebih profesional karena setiap aktivitas dapat diukur, diawasi, dan dievaluasi. Dampaknya adalah meningkatnya efektivitas kinerja dosen, tenaga kependidikan, dan unit-unit pendukung lainnya. Selain itu, prinsip partisipasi memastikan bahwa berbagai elemen seperti dosen, mahasiswa, alumni, dan mitra eksternal dapat terlibat dalam proses pengembangan institusi. Keterlibatan tersebut menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan. Perguruan tinggi yang menerapkan partisipasi dengan baik cenderung lebih adaptif terhadap perubahan serta lebih cepat melakukan pembaruan kurikulum dan inovasi pembelajaran.

Responsibilitas dan fairness juga memberikan kontribusi langsung terhadap mutu pendidikan. Responsibilitas memastikan perguruan tinggi menjalankan peraturan, standar etika, serta prosedur akademik secara konsisten (Thomas & Harden, 2008). Sementara fairness mendorong terciptanya lingkungan akademik yang adil, tidak diskriminatif, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh sivitas akademika untuk berkembang. Implementasi GUG

memiliki pengaruh positif yang kuat terhadap mutu pendidikan tinggi. Melalui tata kelola yang baik, perguruan tinggi tidak hanya mampu meningkatkan kualitas layanan akademik dan non-akademik, tetapi juga memperkuat akreditasi institusi, reputasi, dan daya saing di tingkat nasional maupun global. Dengan demikian, keberhasilan penerapan GUG menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang unggul, berkelanjutan, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

Model Implementasi GUG yang Paling Efektif Berdasarkan Sintesis Literatur

Model implementasi GUG yang paling efektif, berdasarkan sintesis berbagai literatur tata kelola perguruan tinggi, menekankan integrasi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsibilitas, dan fairness dalam satu kerangka manajemen yang terstruktur dan berkelanjutan (Indarti et al., 2022). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi GUG sangat bergantung pada keselarasan antara struktur organisasi, budaya institusi, mekanisme penjaminan mutu, serta kepemimpinan yang visioner.

Pertama, model GUG yang efektif harus berbasis *transparency-based management*. Transparansi diterapkan melalui keterbukaan informasi mengenai kebijakan akademik, anggaran, proses rekrutmen, dan hasil evaluasi mutu. Akses informasi yang luas meningkatkan kepercayaan publik dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan perguruan tinggi. Kedua, prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui *performance accountability model*, yaitu penyusunan indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap unit serta pelaksanaan audit akademik dan keuangan secara berkala. Literatur menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang memiliki sistem akuntabilitas yang kuat cenderung lebih konsisten dalam mencapai target mutu pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.

Ketiga, partisipasi sivitas akademika merupakan elemen penting dalam model implementasi GUG. Melalui *collaborative governance model*, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, alumni, serta mitra eksternal dilibatkan dalam forum musyawarah, perencanaan, hingga evaluasi kebijakan. Model ini dinilai paling adaptif dalam merespons perubahan kebutuhan pendidikan tinggi dan perkembangan global. Keempat, responsibilitas diterapkan melalui kepatuhan pada regulasi pemerintah, standar akreditasi, serta norma etika akademik. Sintesis literatur menunjukkan bahwa perguruan tinggi yang konsisten menjalankan regulasi memiliki stabilitas tata kelola yang lebih baik dan lebih mudah meningkatkan mutu institusional. Kelima, prinsip fairness menjadi fondasi dalam penyelenggaraan layanan akademik dan pengelolaan sumber daya manusia. Model *equitable governance* mendorong keadilan dalam pelayanan, promosi jabatan, penilaian kinerja, dan pemberian penghargaan.

Dari berbagai model implementasi GUG yang paling efektif yakni model terpadu yang menggabungkan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsibilitas, dan fairness dalam sistem manajemen yang terukur, adaptif, dan berorientasi mutu berkelanjutan. Model ini terbukti mampu memperkuat daya saing, reputasi, serta kualitas pendidikan tinggi.

DISKUSI

Implementasi *Good University Governance* pada Berbagai Perguruan Tinggi

One of the most important elements focused on in education reform is the implementation of University Governance. The application of best practices in university governance is known as Good University Governance (Hadiwidjaja & Riana, 2024). Implementasi GUG pada perguruan tinggi menunjukkan variasi yang signifikan antarnegara dan antarjenis institusi, namun pola umumnya mengarah pada penguatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi manajerial melalui kebijakan berbasis data.

Banyak universitas di Eropa dan Asia mulai menerapkan *performance-based governance*, yakni tata kelola yang terintegrasi dengan indikator kinerja institusi, audit mutu, dan pelaporan ke publik. Sementara itu, penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa penerapan GUG difokuskan pada peningkatan transparansi layanan akademik melalui digitalisasi, seperti Sistem Informasi Akademik dan platform keterbukaan dokumen institusional. Selain itu, perguruan tinggi negeri lebih cenderung menerapkan GUG melalui regulasi formal seperti statuta dan peraturan rektor, sedangkan perguruan tinggi swasta menekankan pada penguatan akuntabilitas finansial dan mekanisme partisipasi pemangku kepentingan. Dengan demikian, implementasi GUG di berbagai perguruan tinggi dipengaruhi oleh konteks kebijakan, kapasitas kelembagaan, dan sistem pengawasan internal yang diterapkan. Literatur lima tahun terakhir juga menyoroti bahwa keberhasilan implementasi GUG sangat ditentukan oleh budaya organisasi, kesiapan sumber daya manusia, serta konsistensi kepemimpinan universitas. Studi Marginson menunjukkan bahwa universitas dengan budaya akademik yang kuat dan kepemimpinan kolaboratif lebih berhasil menerapkan prinsip independensi dan keadilan dalam pengambilan keputusan akademik (Marginson, 2021). Di sisi lain, penelitian Altbach dan de Wit menemukan bahwa universitas yang terlibat aktif dalam jaringan mutu internasional cenderung memiliki struktur tata kelola yang lebih profesional, sistematis, dan responsif terhadap tuntutan global (Otto, 2023). Lebih lanjut, penerapan GUG yang efektif biasanya disertai mekanisme evaluasi mutu berkelanjutan, komite audit akademik, dan partisipasi publik dalam perencanaan strategis institusi.

Secara keseluruhan, sintesis penelitian mutakhir menunjukkan bahwa meskipun model implementasi GUG berbeda-beda, universitas yang mampu memastikan integrasi antara kebijakan, teknologi, dan budaya organisasi cenderung mencapai tata kelola yang lebih kredibel dan berdampak pada peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Pengaruh Implementasi *Good University Governance* terhadap Mutu Pendidikan Tinggi

Implementasi GUG terbukti memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan kinerja institusi, kredibilitas, dan efektivitas layanan akademik. Dalam kajian lima tahun terakhir, De Boer dan File menegaskan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi mendorong universitas untuk melakukan pengelolaan kinerja secara terukur sehingga meningkatkan capaian indikator mutu seperti akreditasi, produktivitas penelitian, dan kepuasan mahasiswa (Endawansa & Juwono, 2024).

Studi internasional lainnya menunjukkan bahwa universitas yang mengimplementasikan tata kelola berbasis data dan audit mutu internal memiliki kinerja akademik dan operasional yang lebih stabil dibanding institusi yang belum menerapkan prinsip GUG secara sistematis (Marginson, 2021). Selain itu, keterbukaan informasi publik dan pengawasan organisasi yang terstruktur membantu membangun kepercayaan pemangku kepentingan, yang pada akhirnya memperkuat reputasi dan daya saing universitas di tingkat nasional maupun global. Dengan demikian, implementasi GUG berperan sebagai fondasi peningkatan mutu yang berkelanjutan dalam ekosistem pendidikan tinggi.

Penelitian nasional dan internasional juga menunjukkan bahwa GUG berpengaruh pada peningkatan mutu pendidikan melalui perbaikan tata kelola akademik, efisiensi manajemen, serta profesionalisme sumber daya manusia. Penerapan sistem audit akademik, komite penjaminan mutu, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan mampu meningkatkan kualitas layanan akademik serta konsistensi standar pendidikan di perguruan tinggi Indonesia. Selain itu, implementasi prinsip independensi dan keadilan berkontribusi pada pengambilan keputusan akademik yang objektif, berintegritas, dan bebas dari konflik kepentingan, sehingga meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan penelitian. Universitas yang secara konsisten menjalankan prinsip-prinsip GUG juga memiliki tingkat adaptabilitas yang lebih tinggi terhadap perubahan kebijakan nasional maupun dinamika global, termasuk dalam konteks digitalisasi dan internasionalisasi pendidikan tinggi (Nasaruddin et al., 2023). Dengan demikian, literatur mutakhir menunjukkan bahwa GUG bukan hanya kerangka administratif, tetapi motor penggerak peningkatan mutu yang komprehensif dan berkelanjutan.

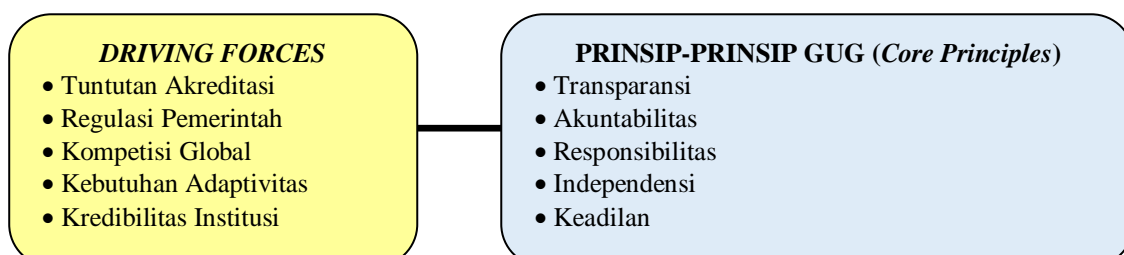
Model Implementasi GUG yang Paling Efektif Berdasarkan Sintesis Literatur

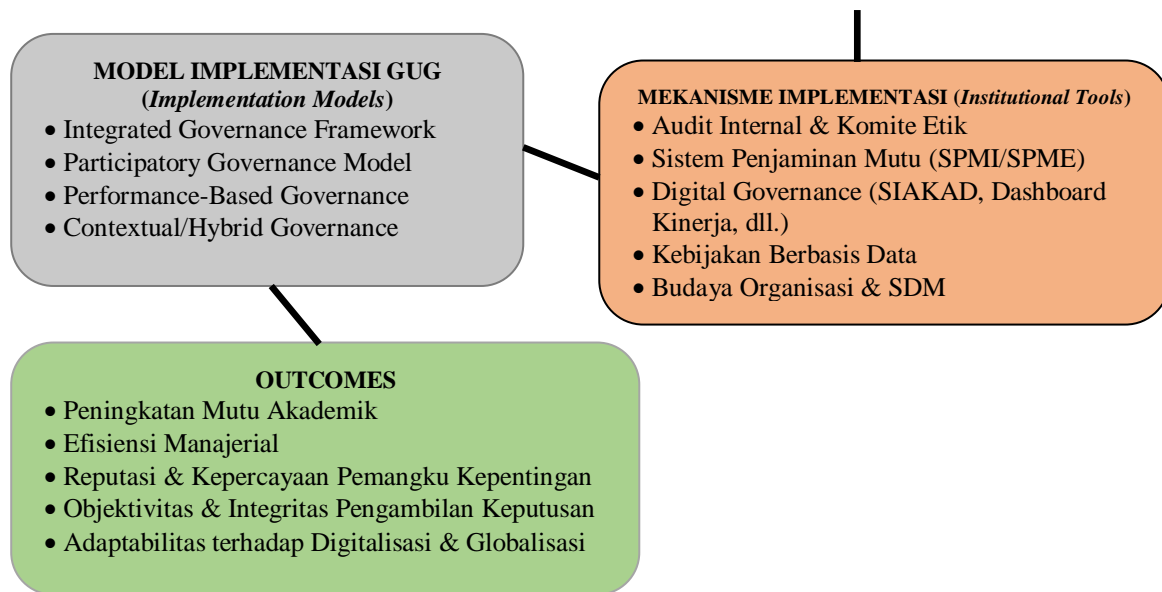
Sintesis literatur lima tahun terakhir menunjukkan bahwa model implementasi GUG yang paling efektif adalah model *integrated governance framework*, yaitu model yang menggabungkan sistem manajemen mutu, tata kelola berbasis data, dan mekanisme partisipatif dalam pengambilan keputusan. Model tata kelola yang mengintegrasikan audit internal, indikator kinerja institusional, serta pelaporan transparan mampu menghasilkan peningkatan konsistensi kebijakan dan efektivitas manajerial. Model ini juga diperkuat oleh pendekatan *digital governance*, di mana universitas memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung keterbukaan informasi, pelacakan kinerja akademik, dan efisiensi proses administratif (Nasaruddin et al., 2023). Studi internasional menunjukkan bahwa universitas dengan model tata kelola terintegrasi memiliki efektivitas lebih tinggi dalam menjaga akuntabilitas, mengurangi potensi konflik kepentingan, dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan (Marginson, 2021). Dengan demikian, model tata kelola terintegrasi menjadi pendekatan paling efektif dalam memastikan prinsip-prinsip GUG berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Literatur lain menyarankan bahwa model GUG yang paling efektif adalah model *participatory governance*, yang menekankan pelibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, termasuk dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, dan mitra eksternal. Partisipasi multi-stakeholder dapat meningkatkan legitimasi kebijakan, memperkuat rasa memiliki terhadap visi institusi, dan membantu universitas merespons dinamika global secara adaptif.

Indonesia menunjukkan bahwa model tata kelola partisipatif yang dipadukan dengan mekanisme penjaminan mutu internal mampu meningkatkan kualitas layanan akademik dan stabilitas organisasi. Model yang menggabungkan partisipasi luas dengan sistem akuntabilitas formal dianggap efektif karena dapat menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kebijakan dan kepatuhan terhadap standar mutu (Page et al., 2021). Secara keseluruhan, sintesis literatur menegaskan bahwa model GUG yang paling efektif adalah yang mampu mengintegrasikan tata kelola berbasis teknologi, akuntabilitas struktural, dan partisipasi inklusif dalam setiap proses pengambilan keputusan institusi.

Berikut konseptual visual hasil dari sintesis literatur:





Gambar 1. Konseptual visual hasil sintesis literatur

KESIMPULAN

Hasil kajian *Systematic Literature Review* menunjukkan bahwa implementasi GUG memiliki peran strategis dalam peningkatan mutu pendidikan tinggi, namun efektivitasnya sangat ditentukan oleh sinergi antara prinsip tata kelola transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan dengan kesiapan struktur organisasi, budaya institusional, serta kapabilitas sumber daya manusia. Penerapan GUG terbukti mampu memperkuat kinerja akademik, meningkatkan efisiensi manajerial, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan ketika didukung oleh sistem penjaminan mutu internal, audit berkala, dan pemanfaatan digital governance yang terintegrasi. Meskipun demikian, literatur lima tahun terakhir juga menunjukkan bahwa tantangan seperti budaya birokratis, resistensi perubahan, keterbatasan infrastruktur digital, serta intervensi eksternal seringkali menyebabkan penerapan GUG menjadi prosedural dan bersifat formalitas. Karena itu, model GUG yang paling efektif adalah model hibrida yang mengintegrasikan SPMI, shared governance, dan sistem informasi digital berbasis data, serta ditopang oleh kepemimpinan visioner dan komitmen institusional terhadap perubahan. Dengan demikian, implementasi GUG tidak dapat dipahami sekadar sebagai pemenuhan regulasi, melainkan sebagai strategi transformasi institusional yang menuntut reformasi struktural, penguatan budaya organisasi, dan orientasi mutu berkelanjutan untuk memastikan peningkatan kualitas pendidikan tinggi secara nyata dan terukur.

REFERENSI

- Apriliani, H., Gandhi Pawitan, & Pius Suratman. (2024). Systematic Literature Review: Analisis Collaborative Governance dalam Program Adiwiyata Sekolah. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan*, 24(02), 36–54. <https://doi.org/10.21009/plpb.v24i02.32857>
- Endawansa, A., & Juwono, V. (2024). Analysis of the Principles of Good University Governance at the University of Indonesia as a State University with Legal Entity (PTN-BH) in 2014-2019. *Jurnal Borneo Administrator*, 20(1), 57–70. <https://doi.org/10.24258/jba.v20i1.1295>
- Hadiwidjaja, R. D., & Endah Riana, K. (2024). Good University Governance to Universities Performance: Systematic Literature Review. *Eduvest - Journal of Universal Studies*, 4(5), 4229–4243. <https://doi.org/10.59188/eduvest.v4i5.1289>
- Hatzichristou, C., & Rosenfield, S. (2017). *International Handbook of Consultation in Educational Setting*. Routledge.
- Indarti, I., Apriliyani, I. B., & Aljufri, A. (2022). Pengaruh Pengendalian Internal, Good University Governance, dan Penggunaan Teknologi Informasi, terhadap Kinerja Perguruan Tinggi. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 312–321. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1030>
- Khotimah, K., Bahtiar, M. D., Ningsih, Y. F., Maspiyah, & Arief, N. A. (2024). Advancing Efficiency, Transparency, and Accuracy of Digital Quality Assurance Systems in Higher Education. *Education Quarterly Reviews*, 7(4), 300–310. <https://doi.org/10.31014/aior.1993.07.04.545>
- Marginson, S. (2021). University Accountability and Stakeholder Trust in the Global Era. *Studies in Higher Education*.
- Nasaruddin, A. H., Das, S. W. N., & Ladiqi, S. (2023). Digital-Based Islamic Religious Education (IRE) Learning Model at Senior High. *Indonesian Journal of Islamic Education Studies (IJIES)*, 6(June), 79–92.
- Otto, J. (2023). *The Internationalization of Higher Education: Institutional Practices and Global Conceptions* (Issue July).
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 Statement: An Updated Guideline for Reporting Systematic Reviews. *BMJ*, 372. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Rahmawati, N., & Samudra, K. (2023). Governance Challenges in Autonomous Universities: a Systematic Review. *International Journal of Educational Development*.
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines. *Journal of Business Research*, 104(March), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the Thematic Synthesis of Qualitative Research in Systematic Reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8, 1–10. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>